

**LAPORAN KINERJA WAKIL KETUA DPR RI
KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN
(KORINBANG)**

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019-2020

30 MARET 2020 – 14 JUNI 2020

Dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, terhitung Masa sidang mulai tanggal 30 Maret 2020 s.d 20 Mei 2020 dan Masa Reses tanggal 21 Mei 2020 s.d 14 Juni 2020, Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang dalam Masa Persidangan III telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

A. PERTEMUAN DENGAN DELEGASI/TAMU DALAM NEGERI

24 Maret 2020, Pimpinan dan Wakil DPR-RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo

Dalam rangka mempercepat gerak melawan covid-19, kemarin Pimpinan dan Wakil DPR-RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dengan pembahasan sebagai berikut :

1. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat langkah melawan covid-19 agar orang yang positif terpapar virus tidak meluas dan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Selain itu DPR dan pemerintah juga membahas bagaimana menjaga ekonomi indonesia agar tetap stabil dan masyarakat tidak kehilangan penghasilan akibat social distancing.



04 April 2020, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Ketua DPR RI beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly mewakili Pemerintah menyampaikan RUU penetapan Perppu kepada Pimpinan DPR RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly mewakili Pemerintah menyampaikan RUU penetapan Perppu kepada Pimpinan DPR RI sebagai landasan hukum dalam keadaan genting dalam rangka menangani ancaman Covid 19. Dengan pembahasan sebagai berikut :

1. DPR bersama Pemerintah bersatu menghadapi ancaman Covid 19 dan mengharapkan langkah penanganan Pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mencari solusi kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi
2. DPR bersama alat kelengkapan Dewan akan segera membahas PERPPU dan segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna.



01 April 2020, Rapat Pimpinan sekaligus rapat kerja Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo.

Rapat Pimpinan sekaligus rapat kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Gugus Tugas Penanganan Corona yang dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. Dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meminta pemerintah mengambil kebijakan dan program yang efektif dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, distribusi bantuan sosial dan APD yang merata ke setiap daerah dan selalu mengedukasi masyarakat terhadap penyebaran dan pencegahan Covid-19.



06 April 2020, Rapat kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perindustrian

Hari ini Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Komisi VI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian. Ada banyak hal yang dibahas dan diperhatikan dampak dari Covid-19. Dengan salah satu pembahasan sebagai berikut :

1. Realokasi anggaran untuk penanganan virus corona. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berharap program pemerintah dalam penanganan dampak virus corona terhadap sektor industri bisa berjalan dengan baik.



09 April 2020, Rapat kerja Virtual Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM melakukan rapat kerja secara virtual untuk membahas dampak para pengusaha kecil ditengah wabah covid 19. Dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan bantuan stimulus untuk UMKM yang terdampak langsung virus corona.
2. Memberikan pendampingan agar bisa memasarkan secara online.
3. Menghimpun data UMKM agar tepat sasaran, pelaku Koperasi dan UMKM Indonesia terutama yang bergerak di bidang fesyen dan konveksi agar ikut terlibat membantu program pemerintah dalam gerakan masker kain dengan memproduksi lebih banyak masker.



14 April 2020, Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Kepala BNPB

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan Kepala BNPB. Dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Dalam pertemuan dengan Kepala BNPB, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengingatkan kepada Kepala BNPB dan seluruh jajarannya, dalam situasi yg sangat memprihatinkan seperti sekarang ini supaya tidak ada yg mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi.
2. BNPB juga harus mengontrol secara ketat penyaluran APD di setiap daerah yang terdampak Covid 19. Disamping biaya pengadaan yg sangat besar jangan sampai terhambat penyalurannya dan membuat keresahan di masyarakat.



19 April 2020, Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Dirut Bank BRI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melakukan pertemuan kerja dengan Dirut Bank BRI ada beberapa hal yang disampaikan terkait pembiayaan koperasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan tentu saja dampak perekonomian masyarakat akibat pandemic covid-19 dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meminta kepada Bank BRI melakukan langkah-langkah strategis untuk memetakan sektor-sektor ekonomi dan daerah yang terdampak dari penyebaran Covid-19, terutama UMKM

Saat ini himbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah, interaksi dengan orang lain dan kontak tatap muka langsung, dan menghindari tempat keramaian. Dan hal ini berdampak langsung bagi pelaku UMKM yang mayoritas masih menggunakan pola jual beli tatap muka.



B. KEGIATAN LAIN-LAIN :

30 Maret 2020, Sidang Paripurna Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bersama ketua DPR RI beserta anggota DPR lainnya melangsungkan sidang paripurna dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sidang Paripurna tetap berlangsung pada hari ini meskipun dalam keadaan darurat virus corona. Namun sidang harus segera dibuka agar Anggota DPR bisa menjalankan tugas dengan maksimal setelah masa reses kemarin.

Protokol covid-19 tetap kami patuhi selama persidangan, sebagian Anggota DPR mengikuti sidang virtual melalui teleconference. Dengan pembahasan sebagai berikut :

1. DPR akan fokus memutus mata rantai virus dan penanganan dampak-dampaknya dari berbagai sektor, termasuk kondisi sosial ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat.



05 Mei 2020, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa persidangan III Tahun 2019-2020 di gedung parlemen

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa persidangan III Tahun 2019-2020 di gedung parlemen yang digelar secara fisik dan virtual. Dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Laporan Badan Legislasi terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
3. Laporan BURT terhadap pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2021.



14 Mei 2020, Rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020

Rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU.



Selasa, 14 April 2020, Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Melalui Virtual. FGD antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan anggota Baleg dan Tim Panja dari Fraksi NasDem DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan anggota Baleg dan Tim Panja dari Fraksi NasDem DPR RI membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Dampak dan penyebaran Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global dalam posisi negative. Berdasarkan data dari beberapa lembaga keuangan dunia merilis angka pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :
 - JP Morgan (20 Maret 2020) proyeksi ekonomi -1,1%
 - The EIU (26 Maret 2020) proyeksi ekonomi -2,2%
 - Oxford Economics (Maret 2020) proyeksi ekonomi 2,5%
 - IMF (27 Maret 2020) proyeksi ekonomi negative (-)

Hal ini juga berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia tahun 2020 yang akan menyentuh angka negatif.

2. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas di DPR RI Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020, harus dijadikan sebagai momentum perubahan dan reformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Fraksi Partai NasDem menginisiasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, harus mengatur secara holistic terkait dengan peningkatan investasi untuk terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, deregulasi dan sinkronisasi peraturan yang tumpang tindih, mentalitas, birokrasi dan Road Map Industry. Hal ini harus menjadi fokus pembahasan dan substansi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Rabu, 22 April 2020, Forum Group Discustion (FGD) antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Anggota Baleg dan Tim Panja dari Fraksi NasDem DPR RI

Setelah memperhatikan penjelasan dari narasumber dan masukan-masukan dalam pertemuan rapat serta diskusi antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Anggota Baleg dan Tim Panja dengan narasumber terkait RUU Omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan masukan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Fraksi NasDem mendorong bahwa Pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tetap untuk dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
2. Terkait dengan substansi dari RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja harus dilakukan komunikasi intens dengan seluruh stakeholders yang berkepentingan.
3. Fraksi partai NasDem menginisiasi penyempurnaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus melibatkan seluruh sektor dari sebelas cluster yang menjadi substansi dari RUU tersebut.
4. RUU tersebut perlu penyempurnaan Naskah Akademis dengan melibatkan pakar dan akademisi yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
5. Untuk selanjutnya pembahasan RUU Omnibus Law perlu mengundang Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik pada minggu depan.

Rabu, 06 Mei 2020, Forum Group Discustion (FGD) antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Ketua Komisi VII, Wakil Ketua Komisi VI serta Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Setelah memperhatikan paparan dan penjelasan dari PT.PGN Tbk dan masukan dan saran dalam Forum Group Discustion ini antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Ketua Komisi VII, Wakil Ketua Komisi VI serta Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem beserta jajaran pejabat PGN Tbk yang membahas RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja terkait dengan Migas, maka terdapat beberapa masukan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah terkait dengan gas bumi lebih untuk kepentingan dalam negeri.
2. Peraturan Menteri ESDM No.58 Tahun 2017 tentang harga jual gas bumi bagus dan tidak ada over pricing. Hal ini meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan menjamin terpenuhinya hak konsumen gas bumi.
3. PT.PGN Tbk masih merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meskipun sudah go public. Karena, saham yang dimiliki public kurang dari 50%, namun saat ini sudah holding dengan Pertamina dengan komposisi saham 57%.
4. Kekurangan gas dalam negeri atau sebaliknya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur.
5. Intervensi pemerintah untuk gas dan minyak bumi cukup tajam.
6. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
7. Intervensi negara untuk minyak dan gas bumi wajib dan harus bersifat positif.
8. Konsumsi migas dalam negeri sejak pandemic Covid-19 anjlok 40%.
9. RUU Minerba sangat dinanti pengusaha sebagai jaminan kepastian berusaha, terutama bagi Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
10. Fraksi partai NasDem tetap minta RUU Minerba tidak masuk tidak termasuk *list carry over*.
11. Defisit produksi gas dan minyak bumi (Migas) Indonesia diperkirakan akan semakin membesar mulai tahun 2025 dan mencapai puncaknya pada tahun 2050. Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk pelaku usaha migas berbisnis di Indonesia dan mendorong mereka agar giat melakukan eksplorasi mencari cadangan migas baru.
12. Hingga kini, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian belum sependapat terkait beberapa hal dalam DIM RUU Minerba, perbedaannya ada pada masalah hilirisasi.

Jumat, 08 Mei 2020, Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) dan Narasumber (melalui virtual) antara Wakil Ketua DPR RI dengan Staff Wakil Ketua DPR RI dan Anggota Baleg DPR RI dari fraksi partai NasDem DPR RI

Setelah memperhatikan paparan dan penjelasan dari Narasumber serta masukan dan saran dalam pertemuan FGD antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan anggota Baleg DPR-RI dengan Narasumber mengenai RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi wabah pandemic Covid-19 dalam menghadapi pertumbuhan perekonomian di negara masing-masing.
2. Indonesia perlu mempunyai *Roadmap* dalam menghadapi situasi perekonomian dimasa pandemic covid-19, khususnya produk dalam negeri.
3. Meminta kepada pemerintah agar Kepala BKPM dapat mencabut peraturan untuk UMKM yang lebih cenderung kepada produk luar negeri (Import).
4. Kepentingan produk nasional harus lebih diutamakan khususnya dalam industry dan ketenagakerjaan.
5. Untuk mencapai tujuan Indonesia kearah 2045, Omnibus Law harus lebih menekankan kepada bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan industri pangan melalui transfer teknologi dari negara-negara maju.

Jumat, 29 Mei 2020, Audiensi/ Pertemuan HPP Law Firm dengan Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang didampingi oleh Wakil Ketua dan Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem DPR RI dan Staf Khusus dan Tenaga Ahli (Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)

Setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Audiens HPP Law Firm serta masukan dan saran dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan Wakil Ketua serta Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam pertemuan ini, mengenai RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja, dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Hpp Law Firm (Mewakili Praktisi Hukum) menyampaikan surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dapat mengikuti RDPU Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR.
2. HPP Law Firm menyampaikan masukan-masukan yang berupa DIM kepada Fraksi Partai NasDem DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang nantinya dapat dijadikan bahan masukan dari Fraksi Partai NasDem pada pembahasan RUU Omnibus Law di Baleg DPR RI.